



Kanisius

PENGANTAR

HUKUM WARIS

PERDATA BARAT



Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum.

PENGANTAR
HUKUM
WARIS
PERDATA BARAT

PENGANTAR
HUKUM
WARIS
PERDATA BARAT

Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra.,S.H., M.Hum

Pengantar Hukum Waris Perdata barat

Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra.,SH., M.Hum

Desain Cover	: M. Musta'in
Editor	: Dra. Devita Hilda
Setting/Layout	: M. Musta'in
Cetak Pertama	: April 2011
ISBN	: 979-978-25-6314-8

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk
Apapun termasuk menggunakan mesin fotocopy.

Diterbitkan :

Laros

Email : penerbit_laros@yahoo.co.id
Flexi : 031-70368481

KATA PENGANTAR

Proses pewarisan di seluruh dunia sama, yaitu harus ada peraturan yang mendasari, yaitu hukum waris, tanpa ada peraturan yang mendasari, akan terjadi kekacauan dalam menentukan siapa – siapa ahliwaris yang berhak mewarisi terhadap harta kekayaan orang yang meninggal dunia (Pewaris). Hukum waris adalah termasuk dalam ranah hukum perdata. Di Indonesia tidak hanya mengenal satu hukum waris, melainkan telah terjadi pluralisme hukum waris, yaitu hukum waris Perdata Barat atau dikenal dengan hukum waris B.W., hukum waris Islam, dan hukum waris Adat. Hukum waris adapun mempunyai banyak versi dan perbedaan antara satu dengan yang lain tidak sama, mengingat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada berbagai adat, tapi merupakan satu kesatuan, dikenal dengan Bhineka Tunggal Ika. Jadi meskipun berbeda – beda, tetapi tetap satu yaitu Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berdaulat.

Pluralisme hukum waris di Indonesia terjadi, disebabkan Indonesia pernah dijajah Belanda selama 3,5 abad. Waktu yang sangat lama, menyebabkan system hukum di Indonesia menggunakan system hukum Penjajah yaitu Belanda. Hal ini terus berlanjut hingga sekarang, karena hukum perdata yang dipakai di Indonesia sekarang ini adalah sama dengan hukum yang digunakan oleh Penjajah di Belanda pada waktu itu. Pengaruh penjajahan dan system hukum yang digunakan di Indonesia tersebut sangat kuat hingga sekarang, sehingga sulit untuk merubah, perlu kajian akademisi yang berdasar norma, berani untuk mendobrak dan menghilangkan pluralisme hukum waris di Indonesia menuju hukum waris nasional, khususnya untuk merealisasi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PHN.03

– DL.05.04 Tahun 2009 tentang Menuju Hukum Waris Nasional.

Hukum waris memang sangat kompleks, perlu pemahaman yang mendalam untuk memecahkan konflik pewarisan dan pembagian hak warisan, mengingat adanya pluralisme hukum waris di Indonesia, sehingga sangat membingungkan dalam pelaksanaan pembagian warisan. Apalagi apabila pewaris meninggalkan anak luar kawin atau melakukan pernikahan ke dua, ketiga tanpa ada perceraian dengan isteri pertama dan dari perkawinan tersebut mendapatkan anak - anak. Akibatnya rumit dalam menentukan siapa – siapa yang menjadi ahliwaris dan bagaimana melaksanakan pembagian warisan, Buku ini memberikan uraian secara detail dan jelas, mudah dicerna dan dipahami, dan dapat dipakai sebagai pedoman dalam menentukan siapa – siapa ahliwaris, dan tata cara pembagiannya, termasuk pelaksana wasiatnya. Untuk mengurangi konflik dalam keluarga berkaitan dengan rebutan harta warisan, maka buku ini juga membahas dan memberikan pemahaman tentang wasiat, macam – macam wasiat dengan segala keuntungan dan kelemahannya. Membuat wasiat adalah salah satu hal yang paling penting yang dapat dilakukan oleh seseorang semasa hidupnya. Dengan membuat wasiat, dapat mengurangi perselisihan dalam keluarga. Setiap orang sepanjang hidupnya berhak membuat wasiat sebagai pesan terakhir yang dikehendaki atas harta peninggalannya, setiap saat ia juga berhak untuk mencabutnya. Namun pemilik wasiat disarankan memperbaharui wasiatnya setiap tahun, karena kemungkinan hartanya bertambah, mungkin juga berkurang karena ada pengalihan.

Buku ini untuk memberikan petunjuk dan penjelasan secara detail bagi praktisi, dan akademisi, khususnya bagi mahasiswa yang sedang mengambil matakuliah hukum waris pada program kenotariatan, dan bagi Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris atau Surat Keterangan Hak Mewaris. Apabila di Indonesia telah terjadi unifikasi hukum waris, maka masyarakat tidak perlu bingung untuk menentukan siapa yang berwenang untuk membuat Surat Keterangan Waris atau Surat Keterangan Hak Mewaris, karena hanya Notaris satu – satunya yang dipercaya oleh Pemerintah dan berwenang untuk membuatnya berdasarkan ketentuan yang berlaku, kecuali ada sengketa.

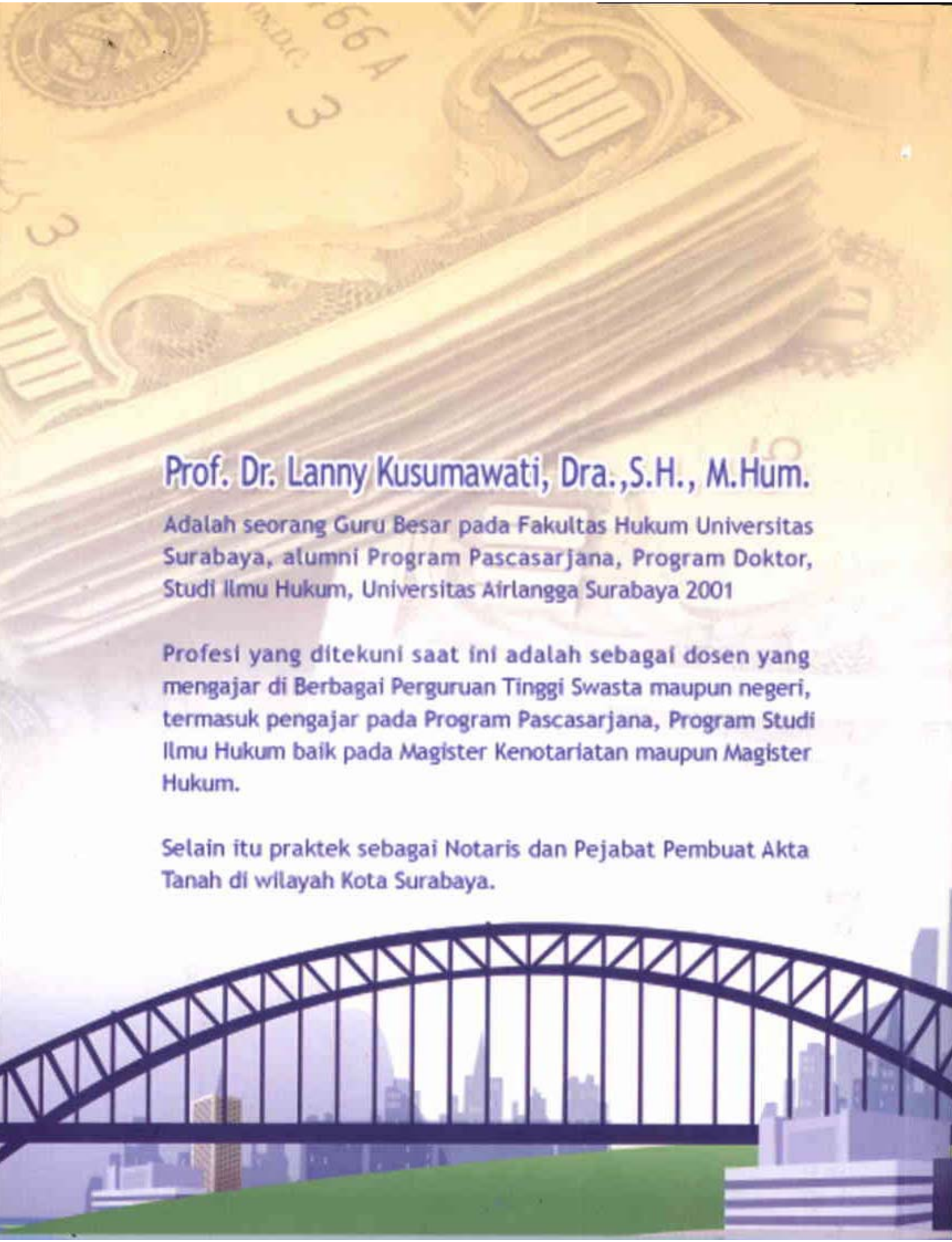
Saya menyadari tulisan ini masih jauh dari sempurna, sehingga perlu kritik dan saran yang sifatnya memperbaiki dan membangun, serta memberikan masukan yang bermanfaat demi penyempurnaan pada pencetakan edisi berikutnya. Dengan demikian buku ini isinya akan lebih baik dan berbobot.

Surabaya, 16 April 2011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENGANTAR HUKUM WARIS	1
1. Pengertian-Pengertian	1
2. Hukum Waris dalam Sistematika Doctrin dan B.W	2
3. Asas Hukum Waris	3
4. Pembagian Beban Pembuktian	5
BAB II GOLONGAN AHLI WARIS	7
1. Diagram Golongan Ahliwaris	7
2. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan	13
3. Berbagai Variasi	16
4. Saudara Kandung dan Tiri	28
BAB III PAMBAGIAN HAK WARISAN YANG ADA TESTAMEN	37
1. Hibah	37
2. Testamen Atau Surat Wasiat	38
3. Hak Mutlak	39
BAB IV BAGIAN MASING-MASING AHLI WARIS MENURUT KETENTUAN UU	59
1. Golongan I	59
2. Golongan II	60
3. Golongan III	65
4. Golongan IV	66
5. Kemungkinan golongan IV mewaris bersama golongan III	67
6. Menghitung manfaat suami atau istri yang hidup terlama	68
BAB V BAGIAN MASING-MASING AHLI WARIS YANG MEWARIS BERSAMA ANAK LUAR KAWIN YANG TELAH DIAKUI SAH	71
1. Golongan I Mewaris Bersama Anak Luar Kawin Yang Telah Diakui Sah Diluar Ikatan Perkawinan Sah	72
2. Golongan I Berasal Dari Dua Perkawinan Sah Dan Sepanjang Salah Satu Perkawinan ada pengaturan	

anak luar kawin	73
3. Golongan II Mewaris Bersama Anak Luar kawin Yang Telah Diakui Secara Sah Oleh Pewaris	77
4. Golongan III Mewaris Bersama Anak luar kawin Yang Telah Diakui secara sah oleh pewaris	88
5. Golongan IV mewaris bersama anak luar kawin yang telah diakui secara sah oleh pewaris	89
6. Beberapa contoh peristiwa hukum waris KUH perdata B.W	91
BAB VI PEWARISAN ANAK LUAR KAWIN (PASAL 862-873)	109
1. Pemecatan ahli waris	111
2. Bagian Bebas	114
3. Menetapkan dan Memenuhi	119
4. Contoh-contoh	121
BAB VII HARTA PERSATUAN DALAM PERKAWINAN KEDUA	129
1. Bagian istri kedua	131
2. Harta persatuan yang untung	138
3. Harta persatuan yang rugi	139
4. Anak luar kawin	140
5. Adanya hibah	143
6. Adanya wasiat	145
7. Perceraian	152
8. Harta persatuan yang berjalan terus	154
9. Contoh-contoh soal dan pembahasannya	158
BAB VIII HARTA WARISAN DAN PEMBAGIANNYA	165
1. Pengakuan anak luar kawin	168
2. Pengakuan sepanjang perkawinan	170
3. Pergantian tempat	173
4. Pemasukan (inbreng)	174
BAB IX MEWARIS DENGAN CARA MENGGANTI	181
BAB X INBRING	193
BAB XI SURAT KETERANGAN WARIS ATAU SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS	195
BAB XII MENOLAK WARISAN	215
A. Cara menolak warisan	215
B. Akibat penolakan	216
C. Perlindungan terhadap kreditur	220



Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum.

Adalah seorang Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya, alumni Program Pascasarjana, Program Doktor, Studi Ilmu Hukum, Universitas Airlangga Surabaya 2001

Profesi yang ditekuni saat ini adalah sebagai dosen yang mengajar di Berbagai Perguruan Tinggi Swasta maupun negeri, termasuk pengajar pada Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Hukum baik pada Magister Kenotariatan maupun Magister Hukum.

Selain itu praktek sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kota Surabaya.